



VOLUME I TRIWULAN II-30 JUNI 2013

ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL ACEH

VOLUME I TRIWULAN II-30 JUNI 2013

Abstract

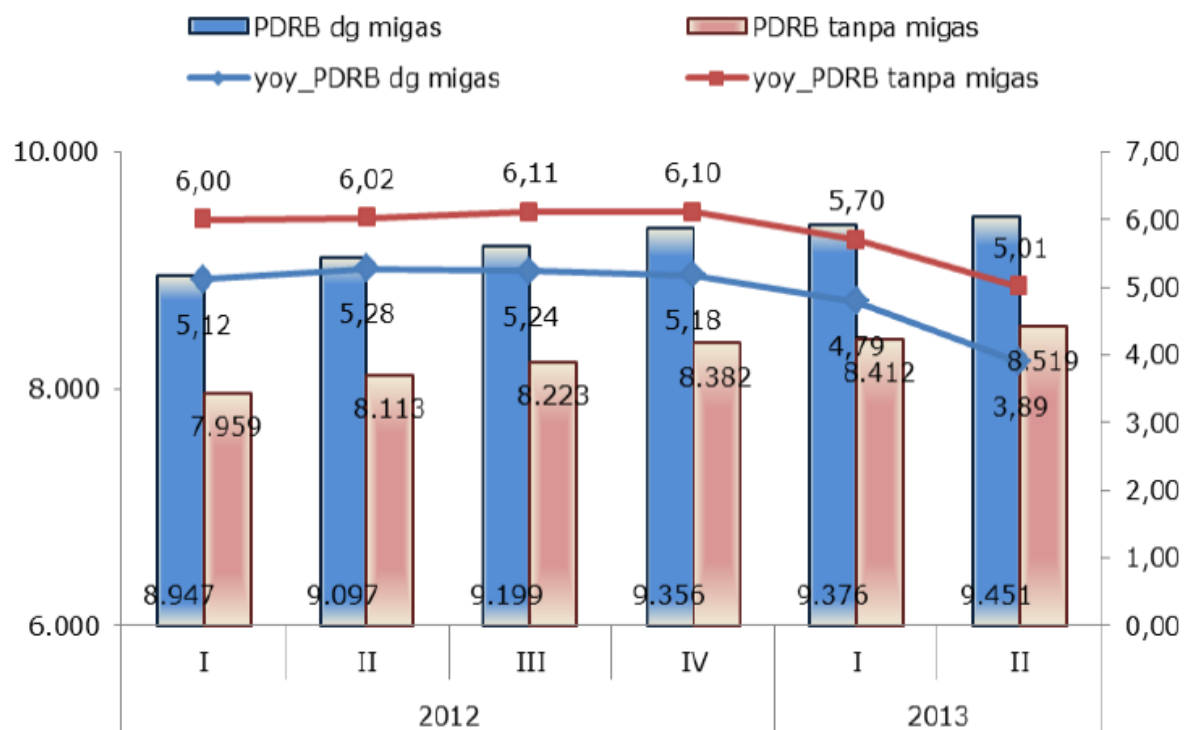
Tujuan akhir ilmu ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlepas apapun sistem ekonomi yang diterapkan (kapitalis, sosialis, komunis, campuran). Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam salah satu pengukurannya (pengukuran lain Indeks Pembangunan Manusia), yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peranan investasi swasta cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun peranan pemerintah juga cukup signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang diimplementasikan pada government budget atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD. Pertanyaan pokok yang harus dijawab dalam kajian ini adalah: apakah dana yang disalurkan melalui APBN/APBD telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar peranan APBN/APBD dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi ekonomi nasional dan daerah.

1 PERKEMBANGAN EKONOMI ACEH

Profil ekonomi Aceh akan disajikan dalam bentuk beberapa indikator ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi (baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi Aceh dibedakan antara pertumbuhan ekonomi dengan minyak dan gas (migas) dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Pembedaan ini diperlukan agar tidak terjadi persepsi yang keliru tentang pertumbuhan ekonomi riil yang mencerminkan kinerja dan kapasitas daerah.

Gambar 1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Aceh



Sumber : BPS Provinsi Aceh, diolah

Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan migas tetapi jumlah nilai tambah PDRB dengan migas

tentunya lebih besar dibandingkan dengan PDRB tanpa migas. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi tanpa migas selalu berada diatas 6 persen pada setiap kuartal dalam tahun 2012 sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan migas selalu berada diatas 5 persen pada setiap kuartal dalam kurun waktu tahun 2012.

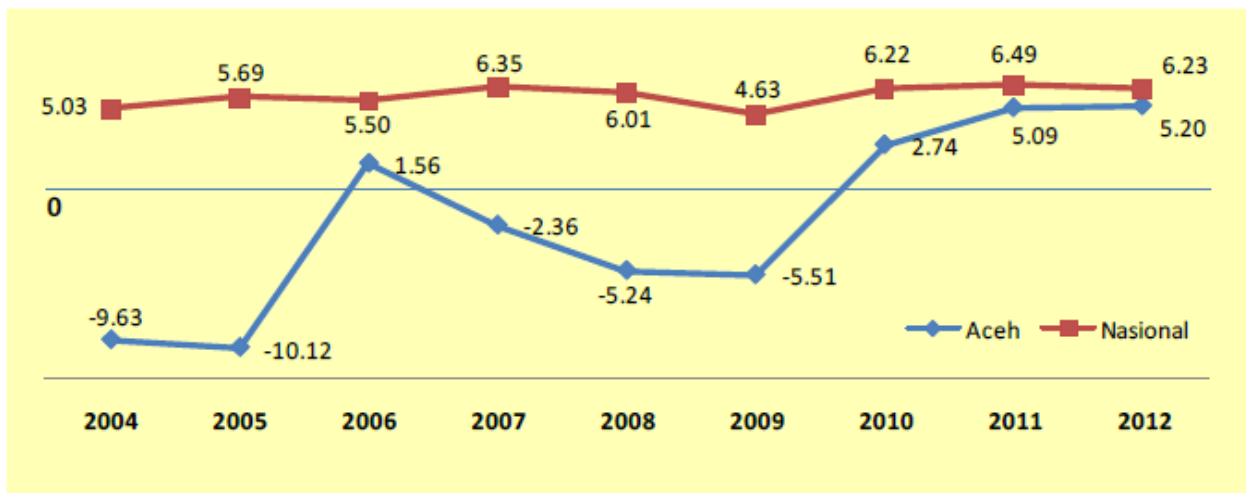
Mulai kuartal I tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami penurunan, baik PDRB dengan migas maupun tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas menurun dari 6.10 persen pada kuartal IV tahun 2012 menjadi 5,70 persen pada kuartal I tahun 2013. Penurunan laju pertumbuhan ini disebabkan oleh belum tersedianya liquiditas dalam perekonomian Aceh. Dana untuk kegiatan pembangunan melalui APBA belum bisa dicairkan dan masih dalam proses negosiasi antara lembaga eksekutif dengan legislatif, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Sumber pertumbuhan ekonomi daerah sangat tergantung kepada dana APBA karena sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari swasta relatif kecil karena tidak adanya industri menengah dan besar di Aceh. Industri Pertambangan Minyak dan Gas seperti PT Arun LNG tidak beroperasi lagi, walaupun sekarang masih diusahakan oleh Pemda agar bisa beroperasi lagi dalam bentuk usaha lain. PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) juga sedang diupayakan oleh Pemda untuk bisa bekerja lagi dengan pasokan input dari daerah lain. Sedangkan Pabrik Semen Andalas di Lhoknga tidak bermanfaat bagi masyarakat lokal dalam penciptaan lapangan pekerjaan karena pabrik ini menghasilkan semen curah yang dibawa ke Medan dengan kapal untuk pengepakan sehingga tenaga kerja yang terserap adalah dari Medan. Disamping itu Pabrik Semen Andalas di Lhoknga ini juga tidak

bermanfaat bagi Pemda karena Kantor Pusatnya berkedudukan di Medan, dengan demikian pajak perusahaan tidak dibayarkan kepada Pemda Aceh.

Dengan demikian kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung kepada sumber dana dari pemerintah daerah atau APBA. Pertumbuhan ekonomi terus menurun dari 5,70 persen pada kuartal I tahun 2013 menjadi 5,01 pada kuartal II tahun 2013. Diharapkan pertumbuhan ekonomi Aceh akan meningkat kembali pada kuartal III dan IV setelah anggaran dicairkan dan project-project mulai dilaksanakan.

Gambar 1.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Aceh dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Pertumbuhan ekonomi Aceh yang minus sejak tahun 2004 adalah tidak mengherankan karena pada kurun waktu tersebut, perekonomian Aceh masih dalam proses recovery dari kerusakan akibat tsunami. Tingkat pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada tahun 2005, yang mencapai minus 10.12 persen sebagai dampak dari kerusakan akibat tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004, tepatnya pada tanggal 26

Desember 2004. Hanya pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Aceh mulai positif dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah yaitu 1.56 persen.

Pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun pada tahun 2009 dari 6,01 persen pada tahun 2008 menjadi 4.63 persen pada tahun 2009 disebabkan oleh krisis ekonomi ternyata berimbas juga kepada pertumbuhan ekonomi Aceh dari -5,24 persen pada tahun 2008 menjadi lebih terpuruk lagi mencapai -5,51 pada tahun 2009.

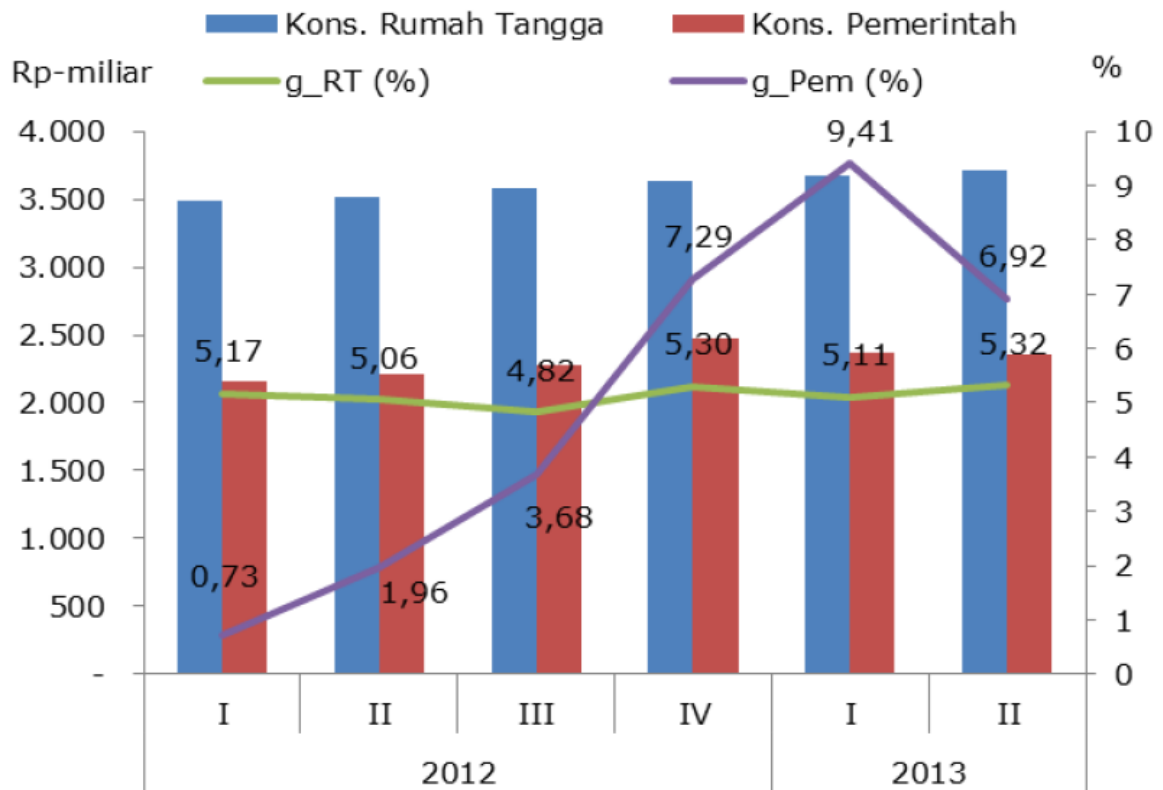
Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Aceh dilihat dari sisi Permintaan

KOMPONEN	2013		yoy,%		qtq,%	
	I	II	I-13	II-13	I-13	II-13
Konsumsi Rmh Tangga	3.667.288	3.705.810	5,11	5,32	0,98	1,05
Konsumsi Pemerintah	2.367.297	2.361.102	8,26	6,92	-5,54	0,79
PMTB (investasi)	1.545.309	1.573.288	5,29	5,12	-2,02	1,81
Perubahan Stok	468.041	498.935	21,65	21,49	5,39	7,24
Ekspor	2.248.943	2.247.533	-4,95	-6,75	3,20	-0,84
Impor	921.284	935.292	-3,01	-1,23	-6,14	2,58
PDRB	9.375.594	9.451.376	4,78	3,89	0,21	0,81

Sumber : Laporan Bank Umum, data diolah

Sejalan dengan analisis pertumbuhan ekonomi Aceh dari sisi Penawaran maka dari sisi Permintaan ternyata bahwa Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan yang minus 5,54 persen pada Kuartal I 2013 dan kemudian meningkat secara perlahan menjadi 0,79 persen pada kuartal II tahun 2013. Hal ini tentunya disebabkan oleh belum cairnya dana APBA pada Kuartal I 2013 sehingga kegiatan ekonomi menjadi mandeg.

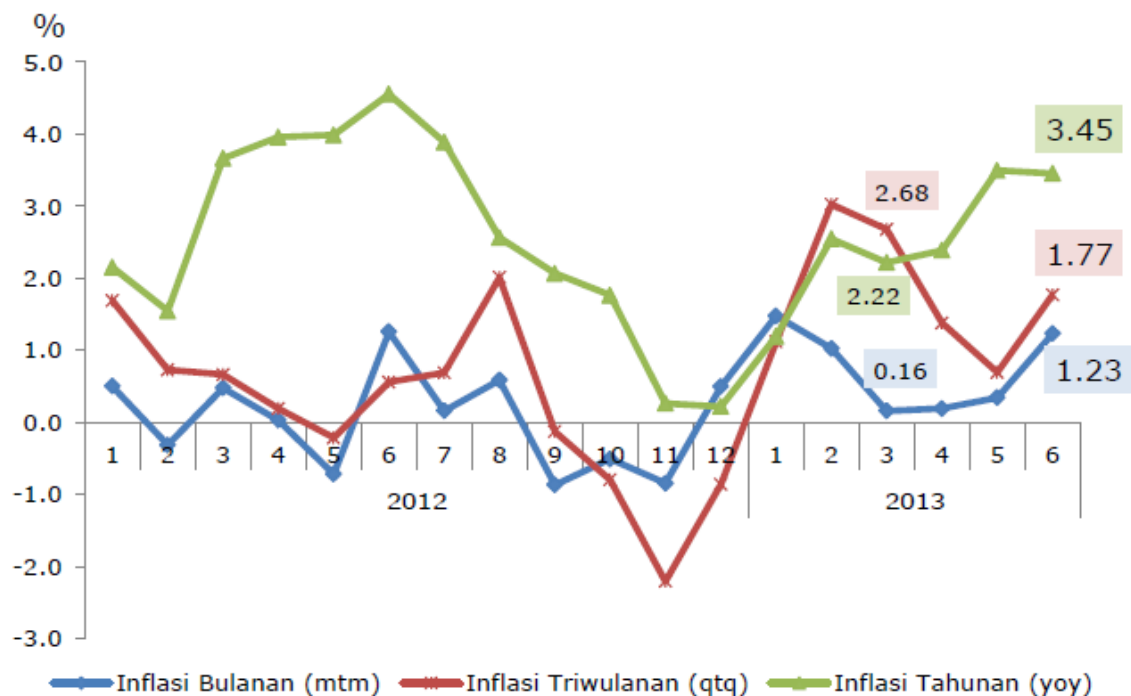
Gambar 1.3
Komposisi dan Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah dan Rumah Tangga



Berdasarkan gambar pada Tabel 1.4 jelas bahwa komposisi konsumsi pemerintah dan rumah tangga relatif stabil dari Kuartal I tahun 2012 sampai dengan Kuartal II tahun 2013. Namun tingkat pertumbuhan Konsumsi Pemerintah bergerak dari 0,73 persen pada Kuartal I 2012 mencapai 9,41 persen pada kuartal II 2013. Phenomena ini memperkuat analisis sebelumnya yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi daerah sangat tergantung kepada dana yang berasal dari APBA baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Gambar 1.4

Perkembangan Laju Inflasi Bulanan, Triwulan dan Tahunan



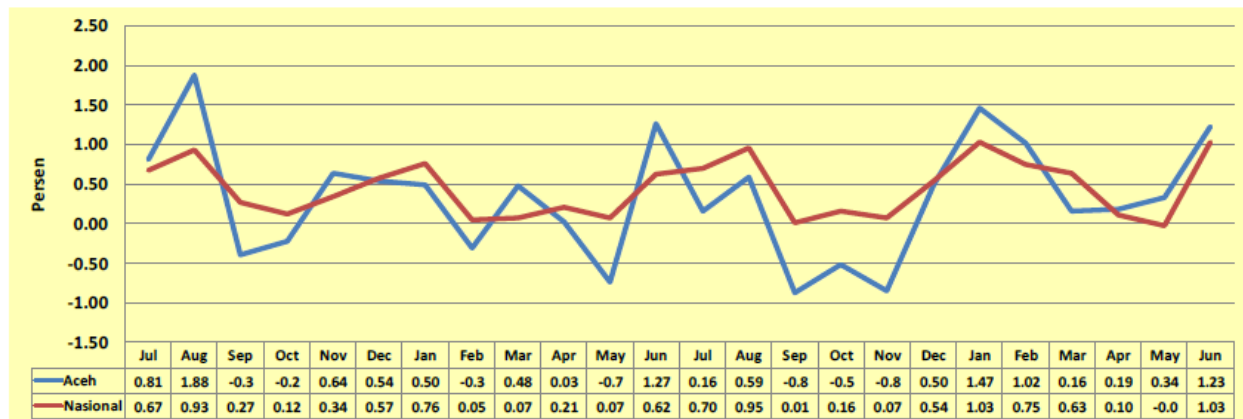
Sumber : BPS Provinsi Aceh, diolah

Perkembangan tingkat inflasi pada kurun waktu mulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 mengalami pergerakan yang cukup fluktuasi. Tingkat inflasi selalu mengalami penurunan pada bulan April dan Mei setiap tahunnya. Kemudian meningkat pada bulan berikutnya yaitu pada bulan Juni dan Juli karena meningkat permintaan terhadap barang-barang konstruksi dan konsumsi juga meningkat karena cairnya dana APBA.

Terjadinya deflasi yang cukup tajam pada November 2012 merupakan phenomena yang menarik untuk dikaji. Demikian juga halnya pada bulan Mei, kecendrungan tingkat

inflasi mengalami penurunan bahkan pada bulan Mei 2012 terjadi deflasi. Pada triwulan I setiap tahun terjadi penurunan tingkat inflasi karena kegiatan ekonomi yang lesu dengan belum cairnya dana dari APBA baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Gambar 1.5
Perkembangan Perbandingan Pergerakan Fluktuasi Inflasi
Antara Aceh dengan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Aceh

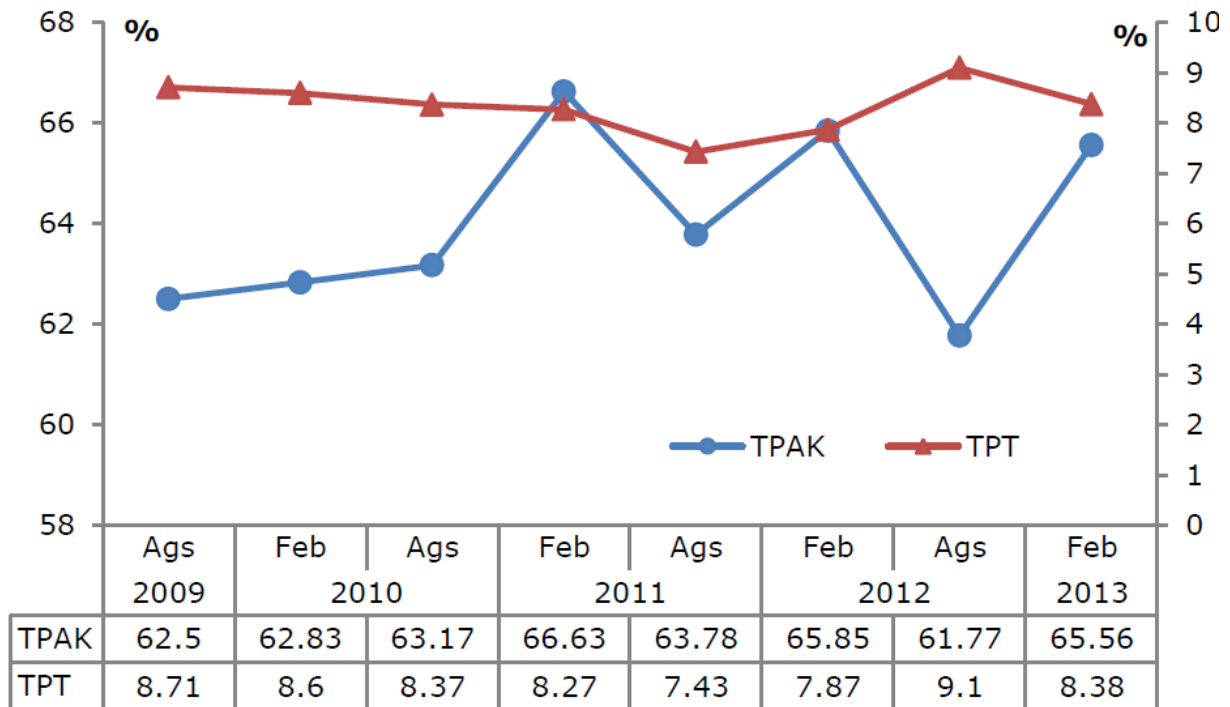
Pergerakan fluktuasi inflasi antara Aceh dan Nasional kurang lebih mengikuti irama yang relatif sejalan walaupun pada beberapa bulan terdapat perbedaan yang sedikit ekstrem ataupun terjadi lag untuk satu atau dua bulan terlambat. Beberapa phenomena menarik untuk ditelusuri penyebabnya.

Pertama, misalnya setiap tahun pada bulan September, Oktober dan Nopember terjadi deflasi, bahkan pada bulan September dan November pada tahun 2012 terjadi deflasi walaupun dengan tingkat yang relatif rendah. Kedua, terjadi perbedaan yang ekstrim pada beberapa bulan tertentu, misalnya pada bulan Agustus 2011 tingkat inflasi di Aceh meningkat secara signifikan mencapai 1.88 persen dibandingkan dengan tingkat inflasi secara Nasional yang hanya mencapai 0.93 persen. Hal yang sama terjadi juga pada bulan Juni 2012 dimana tingkat

inflasi di Aceh mencapai 1.27 persen sedangkan secara Nasional hanya 0.62 persen. Perlu diteliti lebih lanjut penyebab dari fenomena ini.

Gambar 1.6

Perkembangan Tenaga Kerja di Aceh



Sumber: BPS Provinsi Aceh, diolah

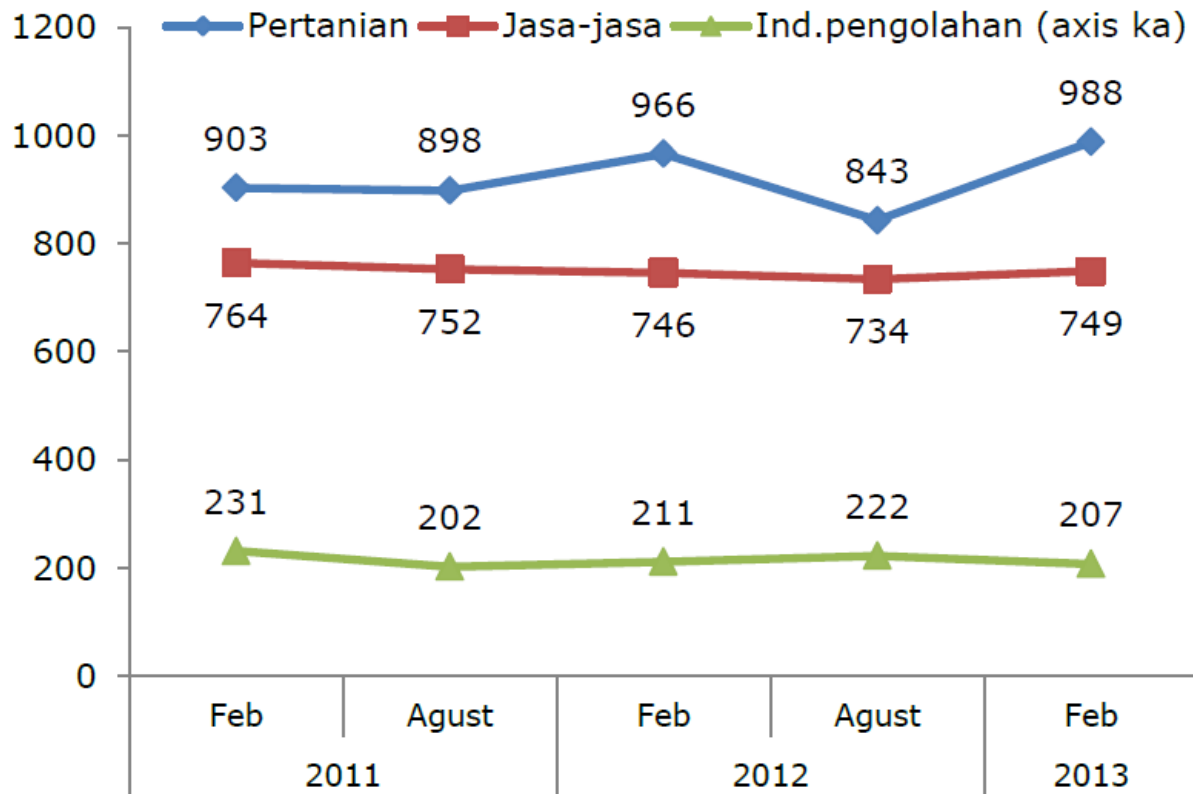
Keterangan: TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Tabel 1.7 ternyata bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2012 dibandingkan dengan pada bulan Februari 2012, hingga mencapai 9.1 persen yang merupakan tingkat pengangguran tertinggi sejak tahun 2009.

Penyebabnya belum diketahui kenapa. Namun, sejalan dengan TPT yang meningkat ternyata tingkat partisipasi angkatan kerja menurun.

Gambar 1.7

Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Utama
(dalam ribuan)



Sumber: BPS Provinsi Aceh

Pada bulan Agustus 2012 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada lapangan kerja utama masing-masing bekerja pada lapangan usaha pertanian sebanyak 843.000 orang, jasa-jasa sebanyak 734.000 orang dan dilapangan usaha industri pengolahan sebanyak 222.000 orang. Kalau diamati dari perkembangan jumlah tenaga kerja dimasing-masing lapangan usaha tersebut ternyata yang paling banyak bekerja pada sector pertanian. Berdasarkan data dapat juga diamati bahwa jumlah tenaga kerja selalu meningkat pada bulan Februari setiap tahun dan

ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja musiman ini kembali ke sector pertanian pada musim tanam. Berarti perkembangan jumlah tenaga kerja ini sifatnya sementara.

Tabel 1.2
Indikator Ketenagakerjaan Aceh Periode Tahun 2008-2010

Uraian	Tahun		
	2008	2009	2010
Angkatan Kerja (juta)	1,793	1,898	1,939
Bekerja	1,622	1,733	1,776
Pengangguran (ribu)	171	165	162
Bukan Angkatan Kerja (juta)	1,180	1,139	1,130
TPAK (%)	60,32	62,50	63,17
TPT (%)	9,56	8,71	8,37

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Aceh, 2011.

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 ternyata bahwa profil ketenagakerjaan di Aceh dalam keadaan stagnan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka mulai dari 9,56 persen pada tahun 2008 menjadi 8,37 persen pada tahun 2010. Jumlah tenaga kerja yang menganggur menurun dari 171 ribu orang pada tahun 2008 menjadi 162 ribu orang pada tahun 2010. Sebahagian besar yang menganggur berdasarkan tingkat pendidikan adalah tamatan SMTA dan jumlah Sarjana yang menganggur juga semakin meningkat.

2 PERKEMBANGAN FISKAL ACEH

Pendapatan daerah berasal dari tiga pos komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pos PAD mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana pada tahun anggaran (TA) 2010 berjumlah Rp. 1,3 T menjadi Rp. 1,9 T pada semester I TA 2013. Namun demikian porsi PAD ini hanya 7,54 persen dari Total Pendapatan Provinsi Aceh. Hal ini tentunya tidak mengherankan karena kegiatan bisnis dan industri di Aceh sangat terbatas sehingga objek pajak yang mungkin untuk dikenakan pajak juga relatif sedikit. Mengukur kemandirian fiskal daerah dengan melihat hanya dari kemampuan daerah dalam memungut PAD adalah merupakan hal yang

Tabel 2.1
Realisasi Pendapatan dari APBD di Provinsi Aceh Semester I Tahun 2013 Secara Agregat
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TA 2010		TA 2011		TA 2012		TA 2013	
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
PENDAPATAN	15.696.061	100,00%	18.757.219	100,00%	21.936.414	100,00%	25.543.661	100,00%
PAD	1.310.523	8,35%	1.451.363	7,74%	1.499.004	6,83%	1.926.583	7,54%
Pajak daerah	599.759	45,76%	797.637	54,96%	810.428	54,06%	871.614	45,24%
Retribusi daerah	146.923	11,21%	163.997	11,30%	163.426	10,90%	325.037	16,87%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	138.220	10,55%	152.953	10,54%	148.552	9,91%	148.186	7,69%
Lain-lain PAD yang sah	425.620	32,48%	336.776	23,20%	376.599	25,12%	581.746	30,20%
Dana Perimbangan	9.913.649	63,16%	11.655.147	62,14%	13.565.648	61,84%	15.618.199	61,14%
DBH	2.097.250	21,16%	2.243.638	19,25%	2.376.568	17,52%	2.620.797	16,78%
DAU	7.003.641	70,65%	8.482.324	72,78%	10.257.063	75,61%	11.719.882	75,04%
DAK	812.758	8,20%	929.185	7,97%	932.017	6,87%	1.277.520	8,18%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.471.889	28,49%	5.650.710	30,13%	6.871.762	31,33%	7.998.879	31,31%
Hibah	238.855	5,34%	87.786	1,55%	46.067	0,67%	32.464	0,41%
Dana darurat	17.986	0,40%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
DBH pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	218.705	4,89%	233.270	4,13%	241.356	3,51%	251.201	3,14%
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	3.884.668	86,87%	5.168.788	91,47%	6.399.620	93,13%	7.612.509	95,17%
Bantuan keu. dari Provinsi atau Pemda lainnya	55.000	1,23%	55.518	0,98%	21.640	0,31%	20.314	0,25%
Lain-lain	56.675	1,27%	105.349	1,86%	163.078	2,37%	82.391	1,03%

Sumber : Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh, Semester I TA 2013

tidak logis karena secara teori, pajak sangat tergantung kepada kegiatan bisnis dan industri di daerah tersebut. Membandingkan Aceh dengan DKI Jakarta misalnya yang kegiatan bisnis dan industrinya cukup signifikan adalah “false comparable” atau perbandingan yang keliru. Disamping itu kewenangan yang terbatas bagi daerah untuk memungut pajak “gendut” juga merupakan hambatan yang diciptakan sehingga kemungkinan PAD untuk mampu membiayai daerah sendiri adalah suatu utopia atau mimpi yang tidak mungkin dicapai.

Dana Perimbangan (DP) merupakan sumber pendapatan terbesar hingga mencapai lebih dari 60 persen dari total penerimaan. Tepatnya pada TA 2010 realisasi DP sebesar Rp. 9,9 T, (63,16%) kemudian meningkat menjadi Rp. 13,5 T (61,84%) pada TA 2012 dan kemudian mencapai Rp. 15,6 T (61,14%) pada semester I TA 2013.

Pada pos pendapatan Lain-lain didominasi oleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dari Rp. 3,8 T pada TA 2010 menjadi Rp. 6,4 T pada TA 2012 dan kemudian mencapai Rp. 7,6 T pada semester I TA 2013.

Tabel 2.2
Realisasi Belanja dari APBD di Provinsi Aceh Semester I Tahun 2013
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TA 2010		TA 2011		TA 2012		TA 2013	
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
BELANJA	17.792.572	100,00%	19.991.099	100,00%	22.953.627	100,00%	27.462.552	100,00%
Belanja Tidak Langsung	8.916.546	50,11%	10.185.200	50,95%	11.918.866	51,93%	12.848.828	46,79%
Belanja Pegawai	6.198.305	69,51%	7.174.471	70,44%	8.093.992	67,91%	9.092.020	70,76%
Belanja Bunga	2.653	0,03%	6.901	0,07%	2.969	0,02%	6.679	0,05%
Belanja Subsidi	14.456	0,16%	11.341	0,11%	11.800	0,10%	7.250	0,06%
Belanja Hibah	976.336	10,95%	1.230.073	12,08%	1.557.336	13,07%	1.794.077	13,96%
Belanja Bantuan sosial	846.172	9,49%	916.187	9,00%	766.897	6,43%	575.771	4,48%
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	318.226	3,57%	255.983	2,51%	271.225	2,28%	275.225	2,14%
Belanja Bantuan Keu kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	482.259	5,41%	517.499	5,08%	1.007.676	8,45%	954.973	7,43%
Belanja tidak terduga	78.140	0,88%	72.745	0,71%	206.971	1,74%	142.833	1,11%
Belanja Langsung	8.876.026	49,89%	9.805.899	49,05%	11.034.761	48,07%	14.613.724	53,21%
Belanja Pegawai	1.024.294	11,54%	1.054.509	10,75%	1.326.415	12,02%	1.647.158	11,27%
Belanja Barang dan jasa	3.204.630	36,10%	5.113.540	52,15%	6.599.731	59,81%	8.465.950	57,93%
Belanja Modal	4.647.103	52,36%	3.637.849	37,10%	3.108.615	28,17%	4.500.615	30,80%

Sumber: Kajian Fiskal Regional Provinsi Aceh, Semester I TA 2013

Sebagaimana yang telah dianalisis sebelumnya pada bagian 1 dari kajian ini bahwa peranan dana APBD di Provinsi Aceh secara agregat sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa pengalokasian dana dalam belanja daerah harus efisien dan tidak mengarah kepada belanja yang non-produktif. Kualitas belanja daerah yang masih belum efisien tercermin dari besarnya Belanja Hibah dan Belanja Pegawai seperti data yang disajikan pada Tabel 2.2. Sejak TA 2010 Belanja Pegawai telah menyerap 69,51 persen dari total Belanja Tidak Langsung dan pos belanja kedua terbesar adalah Belanja Hibah yang mencapai 10,95 persen dari Total Belanja Tidak Langsung. Kondisi ini terus berlanjut sampai dengan semester I TA 2013 yang mencapai 70,76 persen atau Rp. 9 T untuk Belanja Pegawai dan 13,96 persen atau Rp. 1,7 T untuk Belanja Hibah.

Sebaliknya Belanja Modal mengalami penurunan secara nominal dari Rp. 4,6 T pada TA 2010 menjadi Rp. 3,6 T pada TA 2011 dan Rp. 3,1 T pada TA 2012. Kemudian meningkat kembali menjadi Rp. 4,5 T pada semester I TA 2013, walaupun belum sama dengan jumlah Belanja Modal pada TA 2010. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah semua Belanja Modal ini telah dialokasikan pada proyek pemerintah daerah yang produktif dalam artian akan meningkatkan nilai tambah diberbagai sector yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peranan Pemda tidak hanya sebagai alokator dan distributor tetapi yang lebih penting lagi sebagai fasilitator untuk memicu (trigger) pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan infrastruktur ekonomi yang dibutuhkan masyarakat seperti irigasi pedesaan, jalan desa, saluran ke tambak-tambak pesisir pantai, dan pembangunan jalan ke sentra-sentra produksi. Alokasi dana pada sector pendidikan merupakan isu penting karena ternyata jumlah dana yang besar belum menjamin meningkatnya kualitas atau mutu pendidikan (lihat boks).

Tabel 2.3
Realisasi Pembiayaan dari APBD di Provinsi Aceh, Semester I TA 2013

URAIAN	TA 2010		TA 2011		TA 2012		TA 2013	
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
PEMBIYAAAN NETTO	2.095.737	11,78%	1.482.219	7,41%	1.012.896	4,41%	1.932.755	7,04%
Penerimaan Pembiayaan	2.247.579	-	1.721.375	-	1.217.342	-	2.008.234	-
SiLPA TA sebelumnya	2.077.320	92,42%	1.472.246	85,53%	1.149.223	94,40%	1.979.506	98,57%
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.400	0,11%	-	-	-	-	19.997	1,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	121.147	5,39%	232.340	13,50%	13.500	1,11%	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	46.713	2,08%	16.790	0,98%	54.619	4,49%	8.731	0,43%
Pengeluaran Pembiayaan	151.842	-	239.156	-	204.446	-	75.479	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	47.145	31,05%	79.658	33,31%	59.700	29,20%	37.856	50,15%
Pembayaran Pokok Utang	104.697	68,95%	138.597	57,95%	121.271	59,32%	27.922	36,99%
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	9.702	12,85%
Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-	20.902	8,74%	23.475	11,48%	-	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-

***I-Account* APBD Total di Provinsi Aceh** (Dalam Jutaan Rupiah)

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id> (data diolah)

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa telah terjadi SILPA sejak TA 2010 yaitu sebesar Rp. 2 T menjadi Rp. 1,9 T sampai dengan semester I TA 2013. Hal ini terjadi karena adanya berbagai hambatan baik secara teknis maupun politik. Keterlambatan dalam menyetujui dan mengesahkan RAPBA oleh lembaga eksekutif dengan legislatif merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya SILPA. Faktor kedua adalah proses lelang yang penuh dengan berbagai tekanan menyebabkan para SATKER memperlambat proses untuk menghindari berbagai resiko. Faktor ketiga adalah masih terbatasnya sumberdaya berkualitas dalam bidang anggaran terutama dalam mekanisme perencanaan anggaran dan perencanaan kas. Disamping itu kecendrungan setiap SATKER atau lembaga pemerintahan lainnya hanya memiliki sumberdaya manusia tunggal yang ahli dalam

bidang khusus sehingga kalau pegawai ini sakit atau berhalangan maka proses menjadi terhambat.

BOKS: APAKAH ALOKASI DANA PENDIDIKAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN?

DINAS Pendidikan (Disdik) Aceh melakukan perubahan yang mendasar dalam penggunaan anggaran pendidikan. Upaya yang dilakukan itu merupakan bagian untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh, baik guru maupun lulusan.

"KITA sekarang lebih focus untuk meningkatkan mutu guru dan lulusan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017," ungkap Drs. Anas M. Adam, M. Pd, Kepala Dinas Pendidikan Aceh.

Untuk itu, program-program yang mendukung peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan lebih diprioritaskan. Karena itu, Disdik berharap penggunaan anggaran pendidikan di kabupaten/kota juga mengacu kepada peningkatan kualitas mutu pendidikan.

Karena dari Rp. 1,4 triliun anggaran pendidikan pada Disdik itu, 49 persen diantaranya dikelola kabupaten/kota. Sementara Disdik hanya mengelola 34 persen saja anggaran itu, yaitu untuk gaji, kegiatan non fisik Disdik Aceh dan kegiatan non fisik dinas pendidikan kabupaten/kota.

Selebihnya sebesar 31 persen dikelola Dinas Cipta Karya Aceh untuk fisik provinsi dan kabupaten/kota serta 35 persen berada pada Dinas Kekayaan Aceh, untuk alokasi beasiswa anak yatim, DBO, dana kesejahteraan guru serta dana social pendidikan.

"Disdik Aceh sekarang tidak lagi mengurus fisik, meski sekarang ada anggarannya terutama untuk laboratorium dan perpustakaan yang mendukung peningkatan mutu, tapi itu dilaksanakan Dinas Cipta Karya Aceh," ujar Anas.

Selain Disdik Aceh, ada juga SKPA lain yang mengelola dana pendidikan dengan alokasi masing-masing yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh untuk peningkatan mutu pendidikan dayah serta Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh.

Dalam kegiatan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana tercantum dalam RPJM Aceh 2012-2017, Disdik Aceh berupaya mengalokasikan anggaran dengan porsi yang cukup,

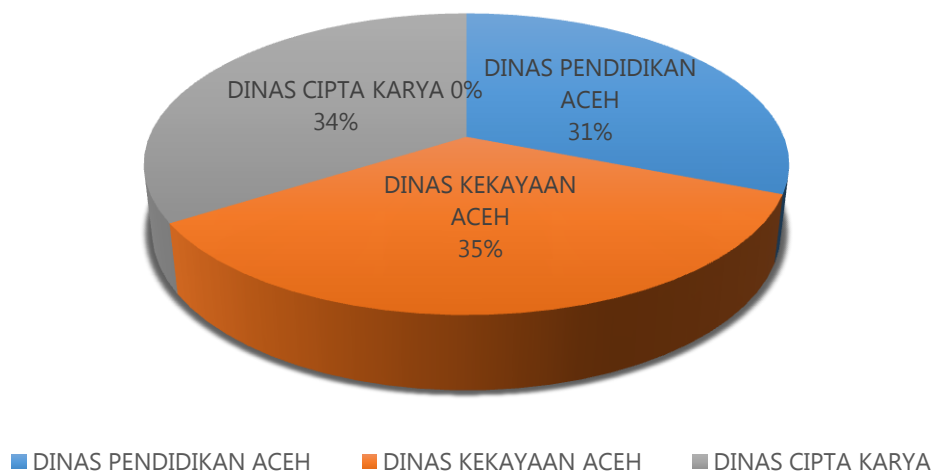
"Kalau pada tahun 2012 itu porsi anggarannya hanya Rp. 57 miliar, sekarang pada tahun 2013 kita tingkatkan menjadi Rp. 268 miliar khusus dalam peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik," cetus Anas M. Adam.

Menurutnya, selama ini guru dan tenaga pendidik telah menerima dana kesejahteraan yang lebih dari cukup, terutama guru-guru yang bersertifikasi. "Tapi dengan kesejahteraan yang cukup itu, mereka lupa untuk meningkatkan kapasitas dirinya," sambungnya.

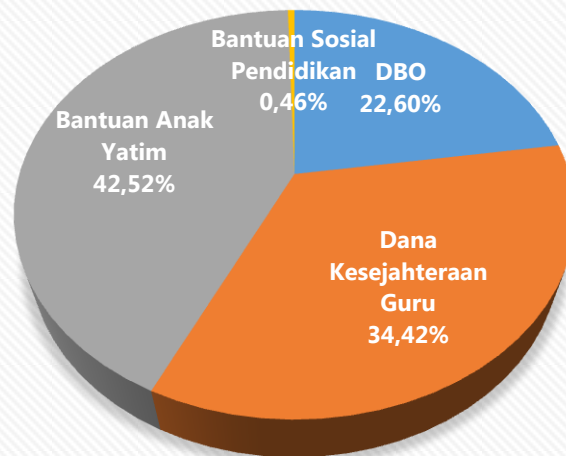
Begitupun, pihaknya tidak mengenyampingkan perhatian kepada program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan luar biasa (SLB), pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta pendidikan non formal.

"Kita juga focus pada peningkatan akses pendidikan," cetus Anas yang sangat berharap semua pihak, masyarakat, dan dunia pendidikan mendukung program-program peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Dikutip dari Muhammad Zairin dalam KIPRAH PENDIDIKAN, Edisi II Tahun 2013

PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN ACEH (RP, 1,4 T) TAHUN 2013

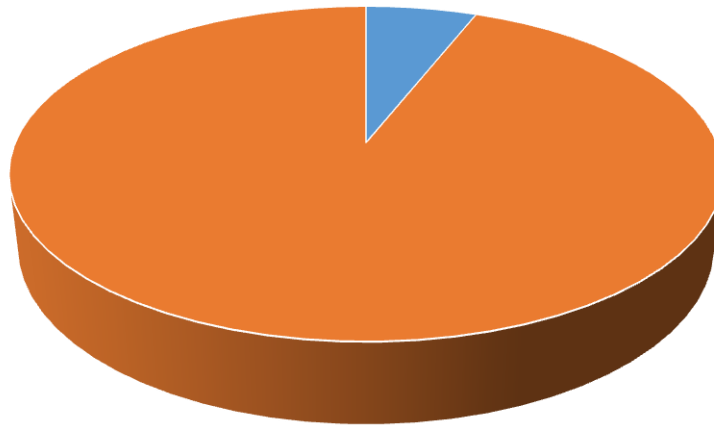


DANA PENDIDIKAN ACEH YANG DIKELOLA OLEH DINAS KEKAYAAN ACEH TAHUN 2013 (BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH)



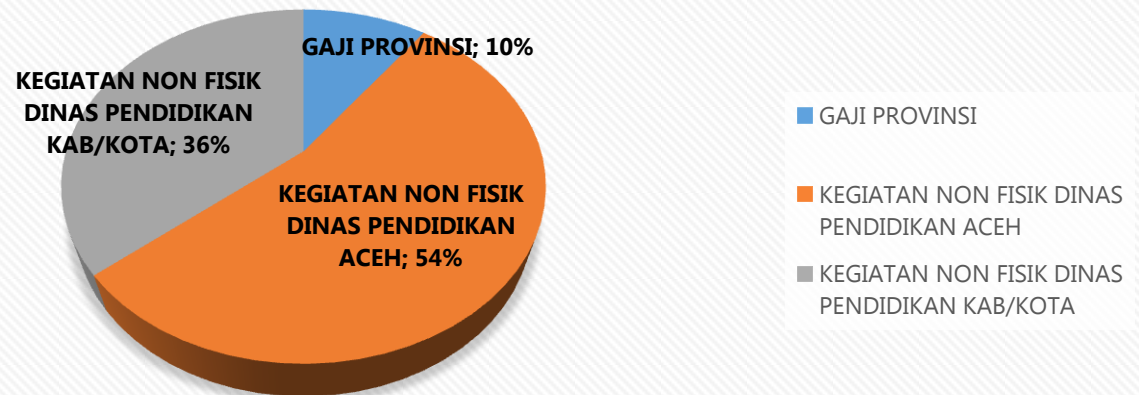
■ DBO ■ Dana Kesejahteraan Guru ■ Bantuan Anak Yatim ■ Bantuan Sosial Pendidikan

DANA PENDIDIKAN ACEH YANG DIKELOLA OLEH DINAS CIPTA KARYA (KEGIATAN FISIK)



■ DINAS ... ■ DINAS ...

DANA PENDIDIKAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAN KAB/KOTA (NON FISIK DAN NON BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH)



Berdasarkan data yang telah disajikan tersebut diatas ternyata bahwa dana untuk pendidikan yang telah disalurkan melalui Dinas Pendidikan baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota cukup besar. Namun demikian, data yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Depdiknas tahun 2012, menunjukkan tingkat kelulusan Ujian Nasional Aceh masih dibawah rata-rata nasional. (dikutip dari Serambi Indonesia, 24 Oktober 2012). Hasil uji kompetensi guru tingkat nasional tahun 2012 menunjukkan kualitas guru di Aceh berada pada peringkat 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Kemampuan lulusan SMA/SMK/MA yang bisa menembus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berada pada peringkat 31 secara nasional (dikutip dari Serambi Indonesia, 3 Januari 2013). Phenomena ini menunjukkan bahwa dana yang cukup belum tentu menjamin kualitas pendidikan yang baik, apalagi kalau dananya relatif sangat kecil maka kemungkinan kecil juga kualitas pendidikan meningkat dengan sendirinya.

3 REKOMENDASI PEREKONOMIAN DAN FISKAL ACEH

1. Alokasi dana Pendidikan yang efisien akan meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh, namun kenyataannya hal ini belum tercapai. Perlu juga diketahui bahwa pendidikan adalah merupakan proses jangka panjang, dampaknya akan terlihat setelah satu atau dua dekade mendatang, tetapi harus dimulai segera dari sekarang.
 2. Dalam upaya mengurangi SILPA pada tahun Anggaran 2014 maka diperlukan adanya disiplin anggaran, strategi untuk mencapai Zero SILPA akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh.
 3. Dalam upaya mendapatkan evaluasi pelaksanaan anggaran yang baik maka Pemerintah Aceh diharapkan mendapatkan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada tahun 2014.
 4. Sehubungan penerapan kebijakan Zero SILPA maka masalah penumpukan diakhir tahun anggaran harus ditekan. Ternyata hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman para SATKER dalam mekanisme perencanaan anggaran dan perencanaan kas. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan adanya pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan bekerja sama dengan Pemda Aceh.
-

-
5. Disiplin siklus anggaran sangat terkait dengan kebijakan legislatif dan eksekutif dalam memutuskan alokasi anggaran dan sebaiknya hal ini harus segera diselesaikan melalui kompromi anggaran diantara kedua lembaga ini melalui Tim Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemda. Keterlambatan dalam mencapai kompromi maka berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.
 6. Pengalokasian dana Penerimaan Aceh pada tahun 2014 mendatang sebaiknya terfokus pada program prioritas sesuai dengan Visi Misi Gubernur sehingga penggunaan dana tersebut menjadi efisien (tidak mubazir). Dana Otonomi Khusus yang cukup besar sebaiknya dialokasi pada program prioritas tersebut.
-



VOLUME I TRIWULAN II-30 SEPTEMBER 2013

ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL ACEH

VOLUME I TRIWULAN II-30 SEPTEMBER 2013

Abstract

Tujuan akhir ilmu ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlepas apapun sistem ekonomi yang diterapkan (kapitalis, sosialis, komunis, campuran). Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam salah satu pengukurannya (pengukuran lain Indeks Pembangunan Manusia), yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Peranan investasi swasta cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun peranan pemerintah juga cukup signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang diimplementasikan pada government budget atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD. Pertanyaan pokok yang harus dijawab dalam kajian ini adalah: apakah dana yang disalurkan melalui APBN/APBD telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar peranan APBN/APBD dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Isu Fiskal utama pada Kuartal III ini adalah sejauh mana efisiensi alokasi DANA OTSUS bermanfaat bagi masyarakat terutama untuk sektor kesehatan dan infrastruktur. Sebagaimana diketahui Aceh telah menerima sebesar Rp. 27,31 T sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Sampai dengan tahun 2027 Aceh akan menerima Rp. 123, 33 T lagi.

-
1. **Laporan RE yang Triwulanan** ; Merupakan ringkasan eksekutif dari KFR atau intisari perkembangan ekonomi & fiskal daerah dimana RE tersebut berada. Judul untuk laporan triwulanan adalah **“Analisa Ekonomi & Fiskal Propinsi....”**. Karena merupakan ringkasan atau intisari maka jumlah halamanpun berkisar 5-10 halaman. Adapun outline pelaporan di dalam tinjauan tersebut adalah sebagai berikut:

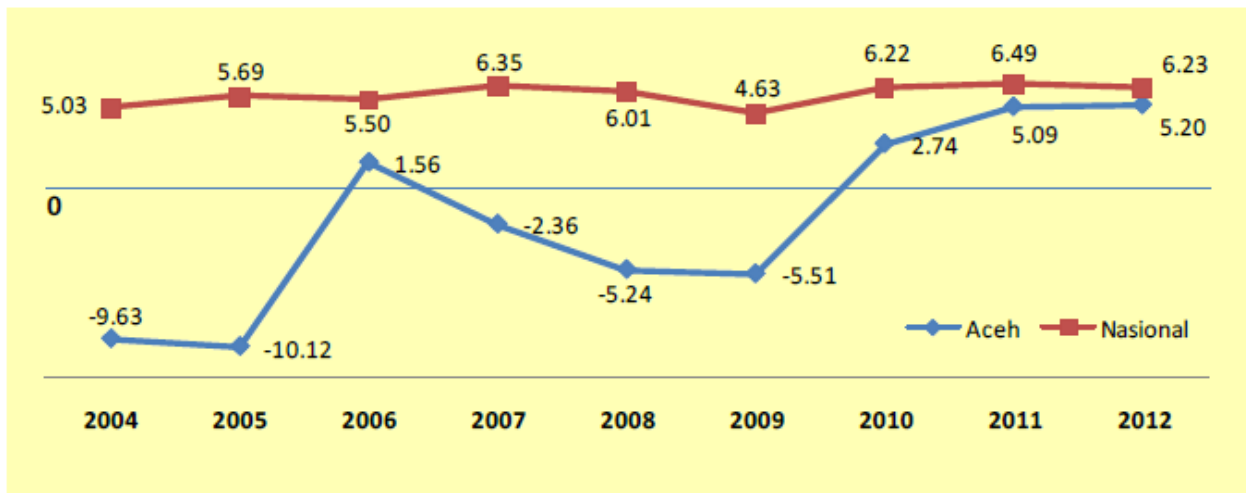
1 PERKEMBANGAN EKONOMI ACEH

Profil perkembangan ekonomi Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut sebagai review sebagaimana yang telah disajikan pada Kajian Ekonomi dan Fiskal Kuartal II yang lalu. Kondisi terkini untuk kuartal III disajikan pada Gambar 1.2 dengan rincian pertumbuhan ekonomi pada kuartal III.

Beberapa isu ekonomi daerah yang menjadi perhatian masyarakat adalah pernyataan Gubernur Aceh untuk mendirikan Rumah Sakit berkualitas di seluruh Aceh dengan mengharapkan bantuan dari Jerman, tetapi hal ini tentunya harus melalui izin yang berbelit-belit lewat Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu, walaupun dana yang akan dicadangkan dari Dana Otsus Otonomi Khusus).

Isu ekonomi kedua adalah pernyataan Wagub Aceh yang menginginkan Pelabuhan Krueng Geukuh di Lhok Seumawe sebagai Pelabuhan Ekspor Impor dan hal ini telah terwujud. Pelabuhan ini dapat mengimpor bahan pangan dan sayur-sayuran dari negara-negara ASEAN. Namun hal ini kurang tepat bagi daerah seperti Aceh karena Aceh adalah daerah pertanian yang justru harus mengeksport hasil-hasil pertanian seperti kopi, kelapa sawit, coklat, minyak atsiri, udang dan tentunya sayur-sayuran dari daerah Aceh Tengah.

Gambar 1.1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh dan Nasional Tahun 2004 - 2012

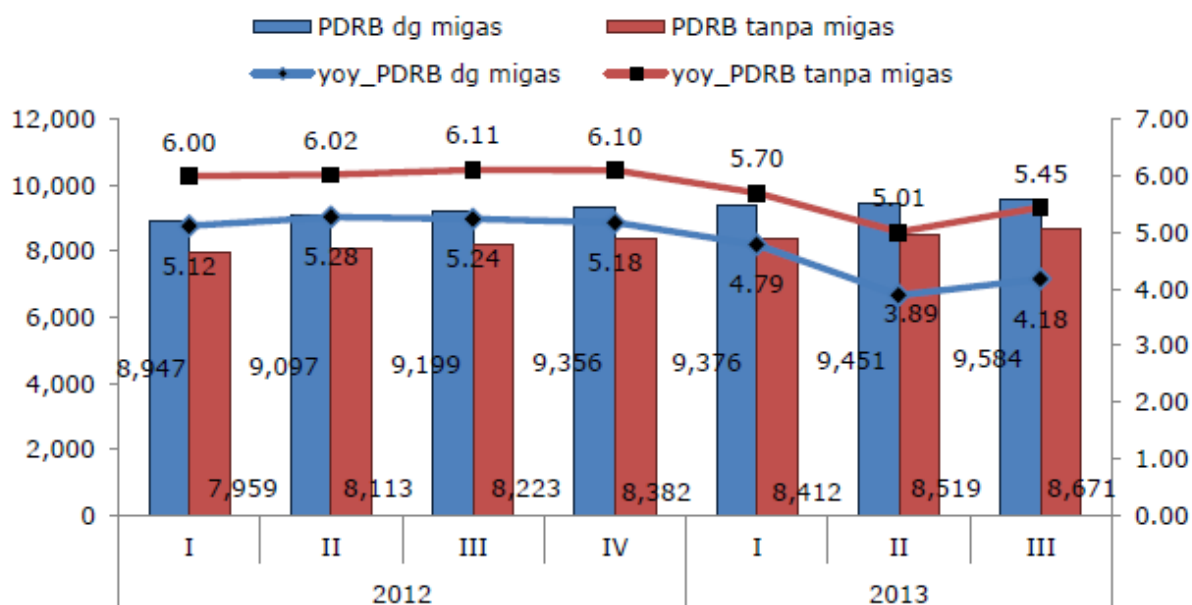


Sumber : BPS Provinsi Aceh

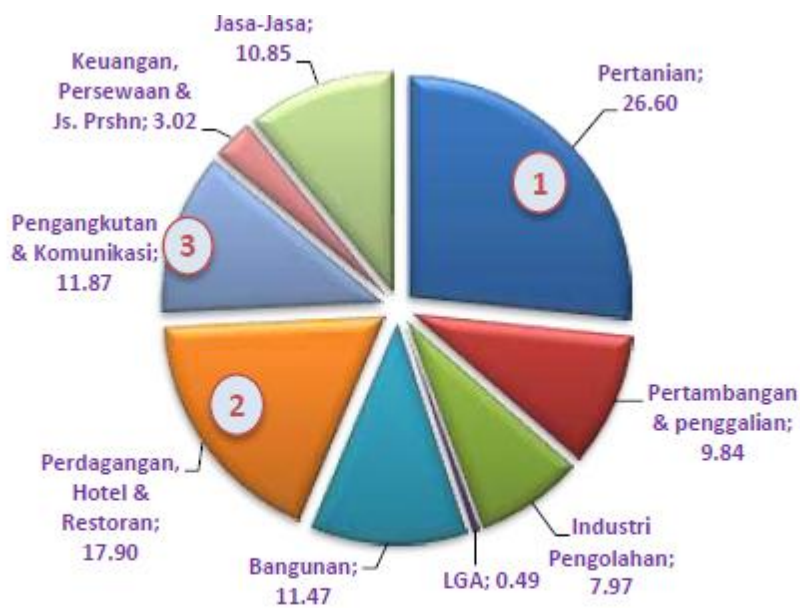
Perkembangan ekonomi Aceh dari sisi penawaran, pada triwulan III tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas meningkat dari 5,01 persen pada trwulan II tahun 2013 menjadi 5,45 persen pada triwulan III. Penyebab dari kenaikan laju pertumbuhan ini tentunya berasal dari aliran dana APBD dari provinsi dan kabupaten kota diseluruh Aceh sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1.2 dibawah ini.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas ternyata laju pertumbuhan ekonomi dengan migas meningkat juga dari 3,89 persen pada triwulan II 2013 menjadi 4,18 persen pada triwulan III dalam tahun yang sama. Sumber dari pertumbuhan ini baru dapat dijawab setelah dikaji lebih lanjut dengan melihat data laju pertumbuhan per subsektor sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 1.1 Jika dilihat dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi triwulan III bersumber dari konsumsi baik rumah tangga maupun pemerintah.

Gambar 1.2
Perkembangan Ekonomi Aceh dari sisi Penawaran sampai dengan Semester 2013



Sumber : BPS Provinsi Aceh, diolah



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Tabel 1.1

PDRB Aceh menurut lapangan usaha pada kuartal I, II, dan III Tahun 2013

Komponen	2013			Growth qtq (%) Tw I		Growth yoy (%) Tw II	
	I	II	III				
1. Pertanian	2,526,750.67	2,513,435.71	2,529,827.15	-0.5	0.7	1.1	2.6
2. Pertambangan & Penggalian	642,744.11	635,763.84	626,951.44	-1.1	-1.4	-1.9	-3.1
A. Minyak Dan Gas Bumi	517,705.15	507,000.92	494,866.80	-2.1	-2.4	-4.4	-5.9
C. Penggalian	125,038.96	128,762.92	132,084.64	3.0	2.6	9.3	9.1
3. Industri Pengolahan	900,296.88	891,841.97	874,173.63	-0.9	-2.0	-0.7	-2.7
A. Industri Migas	445,618.24	435,343.57	418,101.33	-2.3	-4.0	-4.2	-7.2
B. Industri Tanpa Migas	454,678.64	456,498.39	456,072.30	0.4	-0.1	2.9	1.8
4. Listrik, Gas & Air Bersih	36,108.20	37,153.69	38,030.60	2.9	2.4	7.7	6.1
5. Bangunan	686,348.93	701,149.03	720,359.11	2.2	2.7	8.0	6.1
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,978,521.64	2,032,929.01	2,095,758.04	2.7	3.1	8.8	9.6
7. Pengangkutan & Komunikasi	732,745.22	746,995.24	762,125.83	1.9	2.0	6.2	5.7
8. Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.	181,454.35	185,638.24	187,748.65	2.3	1.1	4.6	5.3
9. Jasa-Jasa	1,690,405.88	1,717,913.27	1,748,754.98	1.6	1.8	5.3	5.2
Produk Domestik Regional Bruto	9,375,375.88	9,462,819.99	9,583,729.43	0.93	1.28	4.02	4.18
Tanpa Migas	8,412,052.49	8,520,475.50	8,670,761.30	1.29	1.76	5.02	5.45

Sumber : BPS Provinsi Aceh

Laju pertumbuhan sector pertambangan dan penggalian menurun (minus) kecuali subsector Penggalian pada triwulan III 2013. Laju pertumbuhan sector Perdagangan, hotel dan restoran pada kuartal III paling tinggi dibandingkan laju pertumbuhan sector-sektor lainnya yaitu sebesar 3,1 persen. Peringkat kedua adalah sector Bangunan yaitu sebesar 2,7 persen. Kenyataan ini memberikan bukti lagi bahwa peran APBA Provinsi dan Kabupaten Kota sangat besar dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah karena sector Bangunan dan Perdagangan mulai meningkat pada menjelang akhir tahun 2013 yaitu pada kuartal III.

Sedangkan laju pertumbuhan sector yang paling rendah tapi masih positif adalah sector pertanian yaitu sebesar 0,7 persen dibandingkan dengan laju pertumbuhan sector lainnya. Laju pertumbuhan sektoral yang paling rendah adalah subsector Industri Migas, kondisi ini tentunya berdampak pada penerimaan Bagi Hasil Migas untuk Aceh pada tahun berikutnya.

Tabel 1.2

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kuartal I 2012 – Kuartal III 2013

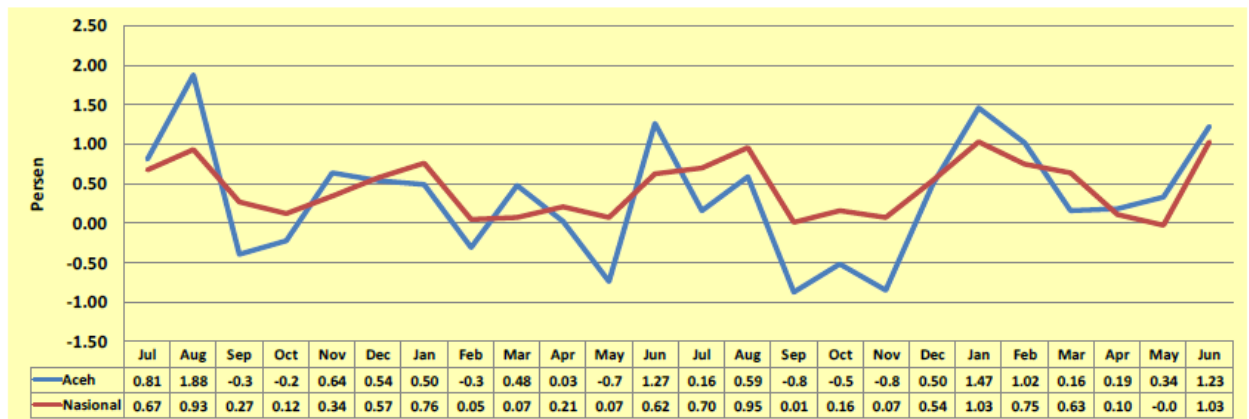
(dalam miliar rupiah)

Modal	I-2012	II-2012	III-2012	IV-2012	I-2013	II-2013	III-2013
PMDN	22	1	-	38	1,522	746	1,031.6
PMA	67.8	3.9	100.1	0.5	40.4	29.4	4.0

Pada kuartal III tahun 2013, inflasi tahunan Aceh mengalami peningkatan akan tetapi sedikit melambat akibat deflasi yang terjadi pada akhir di triwulan II. Realisasi inflasi tahunan Aceh pada triwulan III sebesar 3,45 persen (tahunan atau yoy) dengan inflasi triwulanan sebesar 1,77% (kuartalan atau qtg).

Gambar 1.3

Laju Inflasi Aceh dari Juli 2011 sampai dengan Juni 2013



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Dalam bidang Ketenagakerjaan, ternyata Aceh mengalami penurunan, dimana TPAK yang turun dari 65,56% pada Februari 2012 menjadi 62,07% per Agustus 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 8,38% menjadi 10,03%. Sementara itu tingkat kemiskinan di Aceh pada bulan Maret 2013 sebesar 17,6% yang masih tetap pada peringkat ketujuh tertinggi secara nasional.

2 PERKEMBANGAN FISKAL ACEH

Sampai dengan bulan Oktober 2013, realisasi keuangan dan fisik APBA masing-masing sudah mencapai 42,1 persen (Rp. 4,96 triliun) dan 45,2 persen (Rp. 5,32 triliun), belum mencapai target yang seharusnya sebesar 55 persen keuangan dan 60 persen untuk fisik. SKPA yang berkinerja di atas rata-rata realisasi sebesar 31 dari 57 yang mencapai realisasi lebih besar dari atau sama dengan 55 persen. Realisasi anggaran tertinggi sampai dengan triwulan III disalurkan untuk pegawai dengan total porsi hampir mencapai 48 persen atau sebesar Rp. 2,76 triliun.

Analisis fiskal daerah pada triwulan III akan difokuskan kepada sejauh mana peran APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam analisis selanjutnya akan ditelusuri sejauh mana belanja daerah dialokasikan secara efisien. Jika pada triwulan II telah dianalisis sejauh mana peran belanja sektor pendidikan mampu meningkatkan mutu pendidikan (performance based budgeting atau outcome based planning) maka pada triwulan III ini akan ditelusuri sejauh mana belanja sektor kesehatan bermanfaat bagi masyarakat. Analisis tentang Pendapatan sudah dibahas secara rinci pada triwulan II yang lalu, dengan demikian tidak lagi dibahas pada triwulan III.

Tabel 1.3
Realisasi Belanja APBD Aceh.

URAIAN	TA 2010		TA 2011		TA 2012		TA 2013	
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
BELANJA	17.792.572	100,00%	19.991.099	100,00%	22.953.627	100,00%	27.462.552	100,00%
Belanja Tidak Langsung	8.916.546	50,11%	10.185.200	50,95%	11.918.866	51,93%	12.848.828	46,79%
Belanja Pegawai	6.198.305	69,51%	7.174.471	70,44%	8.093.992	67,91%	9.092.020	70,76%
Belanja Bunga	2.653	0,03%	6.901	0,07%	2.969	0,02%	6.679	0,05%
Belanja Subsidi	14.456	0,16%	11.341	0,11%	11.800	0,10%	7.250	0,06%
Belanja Hibah	976.336	10,95%	1.230.073	12,08%	1.557.336	13,07%	1.794.077	13,96%
Belanja Bantuan sosial	846.172	9,49%	916.187	9,00%	766.897	6,43%	575.771	4,48%
Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes	318.226	3,57%	255.983	2,51%	271.225	2,28%	275.225	2,14%
Belanja Bantuan Keu kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	482.259	5,41%	517.499	5,08%	1.007.676	8,45%	954.973	7,43%
Belanja tidak terduga	78.140	0,88%	72.745	0,71%	206.971	1,74%	142.833	1,11%
Belanja Langsung	8.876.026	49,89%	9.805.899	49,05%	11.034.761	48,07%	14.613.724	53,21%
Belanja Pegawai	1.024.294	11,54%	1.054.509	10,75%	1.326.415	12,02%	1.647.158	11,27%
Belanja Barang dan jasa	3.204.630	36,10%	5.113.540	52,15%	6.599.731	59,81%	8.465.950	57,93%
Belanja Modal	4.647.103	52,36%	3.637.849	37,10%	3.108.615	28,17%	4.500.615	30,80%

Sumber: Kajian Ekonomi dan Fiskal Aceh, 2013.

Analisis yang berbeda akan dikaji tentang alokasi belanja pada Tabel 1.3. Belanja yang sifatnya konsumtif adalah pos Belanja Pegawai baik pada BTL maupun pada BL, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial yang jumlahnya Rp. 12,96 T atau 47,2 persen dari Total Belanja. Sedangkan belanja yang sifatnya produktif ataupun dapat dikategorikan sebagai investasi pemerintah adalah pos Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa yang jumlahnya Rp. 12,9 T atau 47 persen dari total Belanja sebesar Rp. 27,4 T pada TA 2013.

Berdasarkan data tersebut tentunya belum dapat dianalisis sejauh mana peranan alokasi dana sector kesehatan bermanfaat bagi masyarakat. Data yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.4 yang menunjukkan bahwa jumlah dana yang sudah dikucurkan kesektor kesehatan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan menggunakan Dana Otsus sebesar Rp. 2,3 T.

Tabel 1.4
Alokasi Anggaran Dana Otsus Menurut Bidang Sesuai UU No.11 Tahun 2006.

No	BIDANG	ALOKASI (Dalam Rupiah)			
		2008	2009	2010	2011
I	Infrastruktur	1,900,816,287,853	1,757,064,632,554	1,339,615,643,412	1,722,590,421,994
II	Pemberdayaan Ekonomi	860,345,383,818	886,448,382,500	669,139,756,462	805,797,181,040
III	Pengentasan Kemiskinan	11,800,000,000	75,885,559,400	467,810,607,027	398,806,784,306
IV	Pendidikan	417,836,882,946	516,045,330,800	752,076,546,529	637,987,950,022
V	Kesehatan	170,957,794,850	354,625,280,414	464,386,827,313	383,729,324,757
VI	Sosial dan Keistimewaan Aceh	228,386,524,100	138,176,162,865	156,777,459,257	101,551,700,787
	Jumlah	3,590,142,873,567	3,728,245,348,533	3,849,806,840,000	4,050,463,362,906
TOTAL KESELURUHAN		15,218,658,425,006			

Belanja sektor kesehatan Aceh pada tahun 2013 baik untuk provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan sebesar Rp 2,8 triliun. Secara umum, alokasi belanja sector kesehatan tersebut meningkat dari Rp 2,3 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 2,8 triliun pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 22 persen. Belanja tersebut terdiri dari Rp 886 miliar belanja provinsi dan Rp 1,9 triliun atau 69 persen belanja kabupaten/kota.

Alokasi anggaran belanja kesehatan Aceh, termasuk yang bersumber APBN, terhitung hampir Rp 1,1 triliun pada tahun 2013. Dinas kesehatan Aceh mendapatkan sebesar 56 persen atau Rp 621 miliar, sementara itu Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Zainal Abidin), mengelola 19 persen dari belanja pemerintah yang sebagian besar digunakan untuk kuratif. Alokasi untuk Rumah Sakit Ibu dan Anak juga tercatat sedikit meningkat, terhitung sebesar Rp 39 miliar pada tahun 2013.

Alokasi untuk program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) cenderung menurun, dari belanja sebesar Rp 419 miliar pada tahun 2012 menjadi Rp 418 miliar pada tahun anggaran 2013, akan

tetapi alokasi keseluruhan belanja kuratif menjadi makin meningkat, terhitung sebesar Rp 735 miliar pada tahun 2013. Sementara itu belanja preventif (pencegahan) masih tergolong rendah, hanya sebesar Rp 26 miliar.

Belanja terbesar preventif pencegahan penyakit dan pelayanan gizi, ibu dan anak adalah yang paling besar. Hampir setengah anggaran belanja kesehatan jenis preventif 70 persen, atau Rp 18 miliar ditujukan untuk sasaran tersebut, selebihnya merupakan program lainnya seperti kebencanaan atau jiwa.

Walaupun dana yang dikucurkan untuk sector kesehatan cukup besar, namun Aceh masih menduduki peringkat ke sepuluh dalam banyaknya angka kematian bayi (AKB) di Indonesia. AKB Aceh pada tahun 2012 adalah sebesar 47 persen per 1000 lahir hidup,

Angka Kematian Ibu (AKI) di Aceh berjumlah 191 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2012, meningkat dari Rp 158 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2011. Angka tersebut jauh dari target nasional tahun 2014 yakni 112 per 100 ribu kelahiran hidup.

Kenyataan tersebut diatas mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan dana untuk sector kesehatan belum optimal dan tepat sasaran. Program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) untuk setiap orang juga kurang tepat karena sebaiknya subsidi ini hanya diperuntukkan kepada masyarakat miskin saja. Dengan demikian sisa dana tersebut dapat dialokasikan ke program lainnya yang produktif.

BOKS: Isu Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Versus Qanun Nomor 2 Tahun 2013

MULAI tahun 2014 dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah menjadi bagian sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan kabupaten/kota. Kabupaten/kota dapat mengelola sendiri dana tersebut dan SILPA-nya juga sudah menjadi milik kabupaten/kota yang tercatat dalam rekening khusus yaitu rekening program/kegiatan sumber dana Otsus.

Tak bisa dipungkiri bahwa sejak tahun 2008 Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah Aceh yang paling besar. Dana Otsus tersebut didapatkan Pemerintah Aceh berdasarkan amanah dari undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUAP). Pada pasal 183 ayat (2) UUAP disebutkan, Aceh mendapat dana otonomi khusus setara 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.

Penerimaan dana Otsus sebesar 2 persen DAU Nasional ini berlangsung mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya setara 1% (satu persen) plafon DAU Nasional untuk tahun ke 2023 sampai dengan 2027. Artinya, Aceh dapat menikmati anggaran tambahan yang bersumber dari Otsus selama 20 tahun. Karena itulah sumber pendanaan ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan dana Otonomi Khusus tersebut ditujukan untuk membiayai program kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain daripada itu dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Selama ini penggunaan dana Otsus dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan merujuk kepada Qanun 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (TDBH Migas) dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, disebutkan dalam Pasal 11 : Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut : paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh dan paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/kota. Pengalokasian anggaran tidak diberikan dalam bentuk dana tunai akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.

Selama kurun waktu lebih kurang enam tahun, yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, Qanun 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, telah menjadi acuan pengelolaan dana Otsus dan TDBH Migas. Dalam implementasinya, qanun tersebut selalu mendapat kritikan dari berbagai pihak terutama pemerintah Kabupaten/kota di Aceh yang menganggap qanun tersebut terlalu sentralistik kepada Pemerintah Aceh.

Dalam hal ini, ada beberapa hal yang selalu menjadi sorotan Pemerintah Kabupaten/kota. Diantaranya adalah SILPA alokasi Kabupaten/kota tidak pernah dikembalikan lagi ke Kabupaten/kota pada tahun berikutnya karena dianggap telah menjadi SILPA-nya anggaran provinsi (APBA) secara keseluruhan.

Menyahuti masukan dan kritikan dari beberapa Kabupaten/kota, pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mengambil beberapa langkah strategis dalam rangka mempercepat pembangunan di Aceh. Salah satunya adalah melakukan perubahan terhadap Qanun 2 tahun 2008 menjadi Qanun 2 2013 yaitu tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Perubahan yang sangat mendasar pada qanun tersebut adalah pada pasal 11, yaitu: Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut: Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/kota. Dana Otsus juga dialokasikan untuk pembangunan ibu kota provinsi paling banyak 1% (satu per seratus) yang bersumber dari alokasi pembangunan Aceh. Mengenai pemindahan rekening, anggaran Dana Otsus tersebut dialokasikan dalam bentuk dana transfer yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA.

Dengan ditetapkannya Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, maka mulai tahun 2014 dana Otsus sudah menjadi bagian sumber pendapatan untuk pembiayaan pembangunan Kabupaten/kota. Kabupaten/kota dapat mengelola sendiri dana tersebut dan SILPA-nya juga sudah menjadi milik Kabupaten/kota yang tercatat dalam rekening khusus yaitu rekening program/kegiatan sumber dana Otsus.

Dampak lain dari perubahan qanun tersebut menandakan bahwa telah terjadi desentralisasi pengelolaan fiskal terutama sumber Dana Otsus dari pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/kota, dengan harapan dapat mengurangi fiscal gap Antara provinsi dan Kabupaten/kota, mengatasi ketidaksamaan kemampuan fiskal (fiscal inequities) dan ketidaksamaan tingkat efisiensi fiskal (fiscal inefficiencies) suatu Kabupaten/kota, mendukung penerapan standar pelayanan minimum (national minimum standard), mendukung percepatan pencapaian program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RPJM baik provinsi maupun Kabupaten/kota. Semoga kesejahteraan yang telah dijanjikan dapat dinikmati oleh masyarakat Aceh.

Dengan adanya revisi qanun tentang pengelolaan dan pembagian dana Otsus Antara Pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota, maka diharapkan Kabupaten/kota akan lebih leluasa dalam menggerakkan pembangunan sehingga target terwujudnya kesejahteraan rakyat akan mudah diraih. Sumber : Aswar Liam

3 REKOMENDASI PEREKONOMIAN DAN FISKAL ACEH

1. Ketergantungan pertumbuhan ekonomi Aceh pada sumber dana dari APBD provinsi dan kabupaten kota telah dibuktikan dalam beberapa hasil analisis dengan menggunakan data yang telah disajikan.
2. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sector kesehatan belum memberikan manfaat secara optimal. Disamping itu juga penerima manfaat yang kurang adil juga menyebabkan alokasi dana menjadi kurang efisien.
3. Berdasarkan dua kesimpulan pada butir 1 dan 2 diatas maka sangat direkomendasikan agar penggunaan anggaran belanja untuk setiap sector harus lebih efisien. Efisiensi hanya dapat dilaksanakan bila anggaran belanja public tersebut harus transparan untuk setiap program, project dan paket dengan memberikan akses kepada public (masyarakat) untuk mengetahuinya melalui media cetak dan lainnya.